



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS YUNIH**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHH : **14060**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.225.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.848 m²/500 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 1.750 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 1.484 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **460.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU GRENMEK PICKUP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VIOS G TAHUN 2013 VIOS TIPE G Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT NC11BF1CB A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOTOR, HONDA PCX SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. MOTOR, YAMAHA NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **10.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	39.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.734.000.000
III. HUTANG	Rp.	650.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.084.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.